

Jurnal

PERUBAHAN SOSIAL – EKONOMI PKL (Pedagang Kaki Lima) DALAM PROGRAM
SENTRALISASI SEKTOR INFORMAL PERKOTAAN di DTC WONOKROMO¹

Rafif Ramadhan

071114025

Abstrak

Sentralisasi merupakan cara pemerintah untuk membantu mewujudkan Perda No. 17 tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Bermula dari urbanisasi yang menyebabkan kepadatan penduduk akhirnya timbulah sektor informal , sektor informal sangat erat kaitanya dengan perdagangan, terlebih dengan PKL (Pedagang Kaki Lima). Sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 banyak sekali kegiatan ekonomi yang cenderung beralih pada sektor informal. Kegiatan ekonomi sektor informal salah satunya pedagang kaki lima. Bisa dilihat hampir semua kota-kota besar di Indonesia berkembang sangat pesat. Terlebih selama krisis moneter menyebabkan banyak industri gulung tikar, sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Hal ini pada gilirannya menambah pengangguran baru, yang nantinya muncul fenomena-fenomena baru pedagang kaki lima sebagai jalan keluarnya dari pengangguran. Kemampuan sektor informal dalam menampung tenaga kerja didukung oleh faktor-faktor yang ada. Faktor utama adalah sifat dari sektor ini yang tidak memerlukan persyaratan dan tingkat keterampilan, sektor modal kerja, pendidikan ataupun sarana yang dipergunakan semuanya serba sederhana dan mudah dijangkau oleh semua anggota masyarakat atau mereka yang belum memiliki pekerjaan dapat terlibat didalamnya. Studi ini untuk mengetahui kondisi PKL sebelum – sesudah program sentralisasi, kondisi ekonomi sebelum–sesudah program sentralisasi, mengetahui hubungan sosial PKL dengan lingkungan baru,serta strategi adaptasi PKL dalam lingkungan barunya beserta perangkat peraturan yang ada di dalamnya.

A. Pendahuluan

Sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 banyak sekali kegiatan ekonomi yang cenderung beralih pada sektor informal. Kegiatan ekonomi sektor informal salah satunya pedagang kaki lima. Bisa dilihat hampir semua kota-kota besar di Indonesia berkembang sangat pesat. Terlebih selama krisis moneter menyebabkan banyak industri gulung tikar, sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Hal ini pada gilirannya menambah pengangguran baru, yang nantinya muncul fenomena-fenomena baru pedagang kaki lima sebagai jalan keluarnya dari pengangguran. Kemampuan sektor informal dalam

¹ Tulisan ini merupakan ringkasan Skripsi yang berjudul Sentralisasi Sektor Informal Perkotaan (Studi Deskriptif Perubahan Sosial – Ekonomi PKL di DTC Wonokromo.

menampung tenaga kerja didukung oleh faktor-faktor yang ada. Faktor utama adalah sifat dari sektor ini yang tidak memerlukan persyaratan dan tingkat keterampilan, sektor modal kerja, pendidikan.

Sektor yang kini menjadi perhatian pemerintah Surabaya adalah sektor tenaga kerja yang sifatnya informal. Sektor kerja informal ini beroperasi pada tempat-tempat tertentu di setiap pusat keramaian kota. Dengan demikian peranan sektor informal menjadi penting, terutama karena kemampuannya dalam menyerap banyak tenaga kerja dan tidak menuntut tingkat ketrampilan yang tinggi, bahkan sektor informal menjadi wadah pengembangan sumberdaya manusia.

Kelengkapan fasilitas beserta peluang kerja menjadi daya tarik kota Surabaya sebagai destinasi pencari kerja atau yang bisa disebut dengan kaum urban. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat urbanisasi kota Surabaya dari tahun ke tahun terhitung mulai Juni 2013, angka pendatang dari luar Kota Surabaya tercatat sudah mencapai 28 ribu jiwa lebih. (Mencari "Gula" di Surabaya). Menurut Jayadinata, karakteristik sektor informal yaitu bentuknya tidak terorganisir, kebanyakan usaha sendiri, cara kerja tidak teratur, biaya dari diri sendiri atau sumber tak resmi, dapatlah diketahui betapa banyaknya jumlah anggota masyarakat memilih tipe usaha ini, karena mudah dijadikan sebagai lapangan kerja bagi masyarakat strata ekonomi rendah yang banyak terdapat di negara kita terutama pada kota besar maupun kecil. (Jayadinata: 1999, 146).

Pedagang kaki lima selalu memanfaatkan tempat-tempat yang senantiasa dipandang sebagai profit misalkan pusat kota, tempat keramaian hingga tempat-tempat yang dinilai berpotensi untuk menjadi objek wisata. Mereka hanya berfikir bahwa apa yang mereka

lakukan adalah untuk mencari nafkah tanpa memperdulikan hal-hal yang lain. Pedagang kaki lima yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar serta menyediakan kebutuhan hidup bagi masyarakat. Tetapi lain hal keberadaan pedagang kaki lima dianggap mengganggu keindahan dan ketertiban lingkungan Kota. Inilah yang membuat pemerintah turun tangan dalam permasalahan ini.

Usaha PKL dalam memajukan usahanya terlihat jelas dengan kegigihan mereka dalam mengembangkan usahanya. Jenis usaha PKL yang tergolong dalam jenis usaha kecil sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil seharusnya bisa lebih berkembang dengan tidak mengganggu kelangsungan kegiatan publik. Tidak sedikit para pemilik toko dan pengguna jalan merasa terganggu oleh keberadaan PKL. Hal ini disebabkan semakin melebarnya daerah dagang PKL. Campur tangan pemerintah dalam hal ini mempengaruhi pola kehidupan pedagang kaki lima. Hal tersebut terlukis jelas pada konsideran pertama Perda Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL yang hingga saat ini masih berlaku.

Kegiatan-kegiatan informal adalah sebuah acara untuk melakukan sesuatu yang dicirikan: (1) mudah masuk, (2) bersandar pada sumber daya lokal, (3) usaha milik keluarga, (4) operasi skala kecil, (5) padat karya dan *adapted technology*, (6) ketrampilan diperoleh diluar sistem formal sekolah, (7) tidak diatur dan pasar kompetitif. Sebagai tambahan informal sektor juga kerap diabaikan, jarang didukung, kadang diatur dan kadang secara aktif dihambat oleh pemerintah (Firdausy:1995,2). Lebih jauh, Perda no. 17 Tahun 2003 mendefinisikan PKL sebagai aktivitas berdagang yang dilakukan di fasilitas umum. Artinya,

tanpa disadari, PKL sesungguhnya sudah didesain telah melanggar hukum, bahkan sejak ia didefinisikan. Untuk itu, Pemkot memiliki kekuasaan yang sangat besar atas PKL untuk mengizinkan, memindah, melarang, hingga menggusur. Terjadi perubahan solidaritas sosial dari solidaritas mekanis ke solidaritas organis. (Martinus Dkk: 2006,8)

Dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah “*Sentralisasi Sektor Informal Perkotaan (Studi Deskriptif Perubahan Sosial - Ekonomi PKL di DTC Wonokromo)*” khususnya pada lantai 1 dimana kawasan tersebut terdapat banyak para pedagang kaki lima terutama dalam hal sentralisasi dan pemusatan jumlah PKL yang berdagang disitu.

B. KERANGKA KONSEPTUAL

Menjelaskan mengenai sentralisasi PKL baik dilihat dari prospek kebutuhan ataupun melihat strategi adaptasi PKL dijelaskan dengan beberapa konsep

B.1. Konsep Sentralisasi

Sentralisasi adalah penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat yang dianggap sebagai pusat; penyentralan; pemusatan. Atau lebih berarti sebagai memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sentralisasi adalah penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat yg dianggap sebagai pusat; penyentralan; pemusatan.

B.2. Konsep Sektor Informal

Istilah sektor informal pertama kali dilontarkan oleh *Keith Hart* (1971) dengan menggambarkan sektor informal sebagai bagian angkatan kerja kota yang berada diluar pasar tenaga terorganisasi. Aktifitas-aktifitas informal tersebut merupakan cara melakukan sesuatu yang ditandai dengan, Mudah untuk dimasuki; Bersandar pada sumber daya lokal; Usaha milik sendiri; Operasinya dalam skala kecil; Padat karya dan teknologinya bersifat adaptif; Keterampilan dapat diperoleh diluar sistem sekolah formal; dan Tidak terkena secara langsung oleh Regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif.

B.3. Jenis-jenis Sektor Informal

Menurut Keith Hart, (dalam *Journal of Modern African Studies*, 11. (1) 1973, hal 61–89) ada dua macam sektor informal dilihat dari kesempatan memperoleh penghasilan, jika yang sah terdiri atas, kegiatan-kegiatan primer dan sekunder - pertanian, perkebunan yang berorientasi pasar, kontraktor bangunan, dan lain-lain.

B.4. Konsep PKL

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki yang dimaksud adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.

Menurut McGee dan Yeung (1977:hal 25) PKL mempunyai pengertian yang sama dengan "hawkers", yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Menurut Waworoentoe (dalam Widjajanti, 2000: 28), PKL banyak dijumpai pada ruang-ruang fungsional kota. Secara sosiologis, PKL merupakan entitas sosial yang di dalamnya terdapat pengelompokan menurut karakteristik tertentu seperti suku, etnik, bahasa, adat istiadat, asal daerah, jenis kegiatan, dan juga agama (Sarjono 2005:5). Entitas ini memiliki aktivitas yang sama yakni berdagang pada tempat-tempat yang tidak semestinya dalam tata letak kota untuk melakukan aktivitas sosial dan ekonomi. (Sarjono: 2005 hal 28). Alisyahbana (2005:3-12) dalam sebuah penelitiannya menyebutkan bahwa pilihan menjadi PKL biasanya dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Pertama, keterpaksaan, karena tiada pekerjaan lain.

Menurut Bromley, sebagaimana dikutip oleh Mulyanto (2007), "Pedagang Kaki Lima (PKL), merupakan kelompok tenaga kerja yang banyak di sektor informal". Pekerjaan pedagang kaki lima merupakan jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkaia dengan migrasi dari desa ke kota yang besar, pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat di sektor industri.

B.5. Regulasi Sarana Bantu Jual dan Lokasi PKL

Menurut Perda No 17 tahun 2003 pasal 1 ayat 11, sarana bantu jual PKL (gerobak atau rombongan) harus mudah dipindah dan dibongkar pasang, tetapi pengecualian pada sentra-senta PKL disana alat peraga tidak lagi harus mudah dipindah dan dibongkar pasang karena wilayah yang mereka tempati adalah legal bagi mereka untuk berjualan secara permanen.

B.6. Sentralisasi PKL dalam perspektif Pertukaran Sosial Peter M. Blau

Teori pertukaran pada dasarnya menggabungkan tingkah laku sosial dasar manusia dengan struktur masyarakat yang lebih luas, yakni antara kelompok, organisasi, dan Negara. Konsep Blau tentang pertukaran sosial terbatas pada tingkah laku yang mendatangkan imbalan, yakni tingkah laku yang akan berhenti kalau dia berasumsi bahwa tidak bakal ada imbalan lagi. Blau bermaksud menganalisis struktur sosial yang lebih kompleks. Ia memusatkan perhatian pada proses pertukaran yang menurutnya mengatur kebanyakan perilaku manusia dan melandasi hubungan antar individu maupun kelompok. (Ritzer dan Goodman: 2007 hal 235). Pertukaran sosial berangkat dari asumsi *“do ut des”* saya memberi supaya engkau memberi.

Semua hubungan di antara manusia bertolak dari skema memberi dan mendapatkan kembali dalam jumlah yang sama. Konsepsi di atas setidaknya memberikan makna bahwa pada hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi manusia dalam memandang tentang hubungan itu, jenis hubungan yang dilakukan dan kesempatan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain. (Poloma: 2000 Hal 75)

Peter M. Blau dalam (Bernard Radho:176) berpendapat bahwa pertukaran sosial terbatas kepada tingkah laku yang mendatangkan imbalan, yakni tingkah laku yang akan berhenti kalau tidak bakal ada imbalan lagi. Menurut Blau, orang tertarik kepada satu sama lain karena bermacam-macam alasan yang memungkinkan mereka membentuk atau membangun asosiasi dan organisasi sosial. Sebaliknya, imbalan yang tidak seimbang akan

memperlemah bahkan menghancurkan asosiasi itu. Imbalan menurut Peter M. Blau yang dipertukarkan digolongkan ke dalam dua jenis sifat yakni:

Pertama, yang bersifat intrinsik seperti; cinta, afeksi (rasa kasih sayang), dan penghargaan. *Kedua*, yang bersifat ekstrinsik berupa; uang atau barang material lainnya. Sehingga Blau menguraikan bahwa apabila satu orang membutuhkan sesuatu dari orang lain, tetapi memberikan apapun yang sebanding sebagai tukarannya (Radho, 2007 :177).

Melihat konsepsi di atas, dapat ditarik suatu pemahaman; *Pertama*, individu yang membutuhkan orang lain berupaya untuk mendapatkan dukungan dan bantuan demi terciptanya hubungan yang menguntungkan. *Kedua*, orang yang berada dalam relasi tersebut bertindak mencari kebutuhan dan jika tidak ada ganjaran yang diperolehnya maka hubungan yang terbangun akan berantakan. *Ketiga*, adanya perbedaan hubungan di antara individu sehingga terjadi pertentangan maka hal itu mendasari terjadinya perubahan atau peralihan dalam hubungan tersebut. *Keempat*, konsep hubungan yang terjalin dalam masyarakat hanya mengarah pada norma dan nilai untuk mendapatkan penghargaan yang diharapkan. (Amal dalam State of The Art Teori Pertukaran Sosial, hal, 10 – 11)

C. Identitas Responden Dalam Penelitian

Responden dapat diketahui dari perbedaan barang – barang yang dijual di mana responden adalah pedagang pasar DTC Wonokromo lantai 1 dan 2 hanya bagian blok C saja merujuk pada informasi dari Ketua PD. SURYA cabang Wonokromo Bapak Hendra selaku pengelola pasar DTC Wonokromo. Jumlah populasi adalah 249 dengan 12 macam barang yang diperdagangkan.

C.1. Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin responden merupakan karakteristik dari pedagang yang dilihat dari variasi jenis kelamin responden yang berdagang di DTC.

Tabel
jenis Kelamin Respondent

No	Jenis kelamin	F	%
1	Laki-laki	31	62
2	Perempuan	19	38
Jumlah		50	100

Sumber : item pertanyaan no. 2/ koding no. 1

Berdasarkan tabel 3.1.1 dapat kita ketahui bahwasanya terdapat mayoritas 31 responden laki – laki atau 62% dari keseluruhan responden dan 19 orang perempuan atau 38% dari keseluruhan responden yang ditemui oleh peneliti.

C.2.Usia Responden

Usia responden digunakan untuk mengetahui berapa rentang usia responden yang bekerja sebagai pedagang di Pasar DTC Wonokromo. Usia responden kali ini di kelompokkan menjadi 3 interval usia untuk memudahkan mengklasifikasi, yaitu usia 30 tahun sampai 40 tahun, usia 41 sampai 50 tahun, usia 51 s keatas. Dari data tersebut usia paling muda responden adalah usia 35 tahun dan usia paling tua responden adalah 73 tahun.

Tabel
Usia Respondent

No	Usia Responden	F	%
1	30-40	6	12
2	41-50	24	48
3	>50	20	40
Jumlah		50	100

Sumber : pertanyaan no. 3/koding no. 2 dan 3

Dari tabel 3.1.2 kita dapat melihat bahwasanya usia responden menurut interval usianya adalah antara usia 30 tahun sampai 40 tahun berjumlah 6 orang atau 12% dari keseluruhan responden, dan mayoritas usia antara 41 tahun sampai 50 tahun berjumlah 24 orang atau berkisar 48% dari keseluruhan responden, kemudian usia 51 tahun keatas berjumlah 20 orang atau 40% dari keseluruhan responden.

C.3. Pendidikan Terakhir

Pendidikan terakhir responden digunakan untuk mengetahui pendidikan terakhir yang diterima responden. Pendidikan terakhir responden di kelompokkan menjadi 5 interval untuk memudahkan mengkalsifikasi, yaitu tidak sekolah, tidak tamat SD, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA.

Tabel
Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan terakhir	F	%
1	Tidak Sekolah	1	2
2	Tidak Tamat SD	1	2
3	Tamat SD	18	36
4	Tamat SMP	18	36
5	Tamat SMA	12	24
Jumlah		50	100

Sumber : pertanyaan no. 6/koding no. 4

Berdasarkan tabel 3.1.3 di atas dapat diketahui bahwa pendidikan terakhir responden menyatakan ada 1 orang yang mengaku tidak sekolah atau sebesar 2%, yang mengaku tidak tamat SD berjumlah 1 orang atau 2% dari keseluruhan responden, sedangkan yang mengaku tamat SD berjumlah 18 orang atau berkisar 36% dari keseluruhan responden, adapun yang mengaku pendidikan terakhirnya pada jenjang tamat SMP berjumlah 18 orang atau berkisar

36% dari keseluruhan responden, kemudian yang terakhir adalah yang mengaku tamat SMA ada 12 orang atau berkisar 24% dari keseluruhan responden.

C.4. Barang yang di jual

Barang yang dijual merupakan variasi dari identitas responden, yang di kategorikan berdasarkan dagangan. Penjelasan mengenai barang dagangan dibagi dalam 13 katogori dagangan yang di perdagangkan oleh respondent. Pembagian katogori tersebut bedasarkan pada kesesuaian dilkosasi penelitian. Pemilihan kategori tersebut juga didasari atas lokasi pasar yang mengalami kebijakan sentralisasi. Dalam konteks DTC Wonokromo lokasi pasar yang mengalami sentralisasi berada pada Block C yang terletak pada lantai satu DTc wonokromo.

Pembagian jenis dagangan bertujuan untuk menentukan respondent yang mengalami kebijakan sentralisasi. Pembagian responden tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel

Barang yang Dijual

No	Barang yang Dijual	F	%
1	Konveksi	12	24
2	Ayam Potong	8	16
3	Warung	8	16
4	Rombeng	7	14
5	Daging	5	10
6	Sepatu	2	4
7	Ikan Pindang	2	4
8	Arloji	2	4
9	Unggas	1	2
10	Meracang	1	2
11	Mainan	1	2
12	Tempe	1	2
Jumlah		50	100

Sumber : pertanyaan no. 7/koding no. 5 dan 6

Berdasarkan tabel 3.1.4 dapat kita lihat bahwasanya barang yang dijual ada 12 macam dari keseluruhan responden , terdapat 12 orang yang berdagang konveksi (kain) atau mayoritas 24% dari keseluruhan responden, ada masing – masing 8 orang pedagang ayam potong dan warung atau 16% dari keseluruhan responden, dan pedagang barang bekas atau rombeng yang berjumlah 7 orang atau 14% dari keseluruhan responden, sedangkan ada pedagang ikan pindang, sepatu, dan arloji yang masing – masing berjumlah 2 orang atau berkisar 4% dari keseluruhan responden, kemudian yang terakhir ada pedagang merancang, mainan dan tempe yang masing – masing berjumlah 1 orang atau berkisar 2% dari keseluruhan jumlah responden.

D. Strategi Adaptasi PKL Menyikapi Kebijakan Sentralisasi di DTC Wonokromo

Strategi adaptasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pedagang dalam menyiasati perubahan ekonomi di tempat sentralisasi. Pada dasarnya Para pedagang tersebut menggunakan segala cara untuku berdaptasi dengan situasi dan lingkungan baru seperti ketika sebelum berpindah dan berpindah serta melihat keadaan ekonomi sebelum proses sentralisasi dan kondisi ekonomi sesudah program sentralisasi serta melihat hubungan sosial dan strategi adaptasinya dalam menjalani lingkungan dagang baru di Pasar DTC Wonokromo. Penjelasan mengenai strategi adaptasi dilihat dari

D.1.Kondisi PKL Sebelum Pelaksanaan Sentralisasi

Kondisi PKL sebelum pelaksanaan sentralisasi merupakan keadaan secara fisik dari PKL meliputi aspek lokasi berjualan sebelum program sentralisasi.

Tabel 4.1.1

Kondisi PKL Sebelum Pelaksanaan Sentralisasi

No.	Sebelum pelaksanaan sentralisasi	F	%
1	12 – 14 (kurang)	18	36
2	15 – 17 (sedang)	28	56
3	18 – 19 (nyaman)	4	8
Jumlah		50	100

Sumber : variabel Kondisi PKL Sebelum Pelaksanaan Sentralisasi pertanyaan no. 8 – 13/koding no. 7 – 17

Berdasarkan tabel 4.1.1 dapat disimpulkan bahwa kondisi PKL sebelum pelaksanaan sentralisasi sebesar 36% berada pada interval yang kurang dan sebesar 56% atau mayoritas berada pada interval sedang. Sebesar 8% berada pada interval nyaman.

D.2. Kondisi PKL Sesudah Pelaksanaan Sentralisasi

Kondisi PKL sesudah pelaksanaan sentralisasi merupakan keadaan secara fisik dari PKL meliputi aspek kepemilikan stand , sistem kepemilikan stand, peran pemerintah dalam sentralisasi serta alasan pindah menuju Pasar DTC Wonokromo.

Tabel 4.2.1

Kondisi PKL Sesudah Pelaksanaan Sentralisasi

No.	Sesudah pelaksanaan sentralisasi	F	%
1	27 – 33 (kurang)	12	24
2	34 – 40 (sedang)	27	54
3	41 – 45 (nyaman)	11	22
Jumlah		50	100

Sumber : variabel Kondisi PKL Sesudah Pelaksanaan Sentralisasi pertanyaan no. 14 – 28/koding no. 18 – 40

Berdasarkan tabel 4.2.1 dapat disimpulkan bahwa kondisi PKL sesudah pelaksanaan sentralisasi sebesar 24% berada pada interval kurang dan sebesar 54% atau mayoritas berada pada interval sedang. Sebesar 22% berada pada interval nyaman.

D.3.Perubahan Kondisi Ekonomi Sebelum Program Sentralisasi

Melihat perubahan kondisi ekonomi sebelum program sentralisasi dilihat dari aspek pendapatan sebelum sentralisasi, pengeluaran, kepemilikan pegawai, penarikan iuran dan bentuk penarikan iuran.

Tabel 4.3.1

Perubahan Kondisi Ekonomi Sebelum Program Sentralisasi

No.	Perubahan kondisi ekonomi sebelum program sentralisasi	F	%
1	7 – 10 (kurang)	16	32
2	11 -14 (cukup)	31	62
3	15 – 18 (lebih dari cukup)	3	6
Jumlah		50	100

Sumber: variabel Perubahan Kondisi Ekonomi Sebelum Program Sentralisasi pertanyaan no. 29 – 36/koding no. 41 – 50

Berdasarkan tabel 4.3.1 dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi PKL sebelum sentralisasi sebesar 32% berada pada interval yang kurang dan sebesar 62% atau mayoritas berada pada interval cukup. Sebesar 22% berada pada interval lebih dari cukup.

D.4.Perubahan Kondisi Ekonomi Sesudah Program Sentralisasi

Melihat perubahan kondisi ekonomi sebelum program sentralisasi dilihat dari aspek pendapatan sebelum sentralisasi, pengeluaran, kepemilikan pegawai, penarikan iuran.

Tabel 4.4.1

Perubahan Kondisi Ekonomi Sesudah Program Sentralisasi

No.	Perubahan kondisi ekonomi sesudah program sentralisasi	F	%
1	5 – 7 (kurang)	24	48
2	8 – 10 (cukup)	25	50
3	11 – 13 (lebih dari cukup)	1	2
Jumlah		50	100

Sumber : variabel Perubahan Kondisi Ekonomi Sesudah Program Sentralisasi pertanyaan no. 37 – 43/koding no. 51 – 59

Berdasarkan tabel 4.4.1 dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi PKL sesudah sentralisasi sebesar 48% berada pada interval yang kurang dan sebesar 50% atau mayoritas berada pada interval cukup. Sebesar 2% berada pada interval lebih dari cukup.

D.5.Hubungan Sosial

Melihat hubungan sosial pedagang dalam program sentralisasi dilihat dari aspek hubungan responden dengan pedagang yang lain, hubungan dengan konsumen, hubungan dengan distributor dan hubungan dengan pengurus pasar.

Tabel 4.5.1

Hubungan Sosial

No.	Hubungan social	F	%
1	28 – 36 (sangat membutuhkan)	19	38
2	37 – 45 (membutuhkan)	27	54
3	46 – 52 (tidak saling membutuhkan)	4	8
Jumlah		50	100

Sumber : variabel Hubungan Sosial pertanyaan no. 44 – 62/koding no. 60 – 85

Berdasarkan tabel 4.5.1 dapat disimpulkan hubungan sosial pedagang dengan pedagang lain, konsumen, distributor serta pengurus pasar sebesar 38% berada pada interval yang sangat membutuhkan dan sebesar 54% atau mayoritas berada pada interval membutuhkan. Sebesar 8% berada pada interval tidak saling membutuhkan.

D.6 Strategi Adaptasi

Melihat strategi adaptasi pedagang dalam program sentralisasi dilihat dari aspek pergantian kepengurusan, pergantian peraturan, pergantian lokasi berdagang, dan kendala yang dialami responden saat berdagang di pasar.

Tabel 4.6.1
Strategi Adaptasi

No.	Strategi adaptasi	F	%
1	46 – 58 (sangat adaptif)	12	24
2	59 – 71 (adaptif)	22	44
3	72 – 83 (tidak adaptif)	16	32
Jumlah		50	100

Sumber : variabel Strategi Adaptasi pertanyaan no. 63 -73/koding no. 86 – 15

Berdasarkan tabel 4.6.1 dapat disimpulkan strategi adaptasi pedagang menghadapi lingkungan dan pengurus dan peraturan baru dengan sebesar 24% berada pada interval yang sangat adaptif dan sebesar 44% atau mayoritas berada pada interval adaptif. Sebesar 32% berada pada interval tidak tidak adaptif.

D.7. Penjelasan Praktek Stimulus - Respon dalam Sentralisasi PKL

Peter M. Blau menjelaskan pertukaran sosial terbatas kepada tingkah laku yang mendatangkan imbalan, yakni tingkah laku yang akan berhenti kalau tidak bakal akan ada imbalan lagi dan orang-orang tertarik kepada satu sama lain karena bermacam-macam alasan yang memungkinkan mereka membentuk atau membangun asosiasi atau organisasi sosial.

Pemerintah dan PKL mempunyai hubungan pertukaran yang berbeda, dari dua pihak yang peneliti bahas antara pemerintah dan PKL, pemerintah memiliki kepentingan untuk menertibkan PKL. Sedangkan dari pihak PKL mempunyai kepentingan mengenai keuntungan. Sentralisasi berkepentingan untuk menjembatani kepentingan kedua belah pihak.

Upaya sentralisasi dianggap bisa menjembatani karena bisa menjawab keinginan kedua belah pihak, dari pemerintah sendiri menjadikan sentralisasi sebagai senjata untuk melancarkan Perda Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL yang hingga saat ini masih berlaku. Dalam pemikiran Blau sentralisasi yang notabene adalah buatan pemerintah sebagai stimulus dari pemerintah. Dalam interaksi antara pemerintah dan PKL dapat disimpulkan bahwa pemerintah berupaya memusatkan aktifitas sektor informal ke Pasar DTC Wonokromo.

Stimulus ditunjukkan pada tabel 4.1.1 yang mendeskripsikan tentang kondisi PKL sebelum pelaksanaan sentralisasi sebesar 36% berada pada interval kurang dan sebesar 56% atau mayoritas berada pada interval sedang. Sebesar 8% berada pada interval nyaman.

Selanjutnya pada tabel 4.2.1 yang mendeskripsikan bahwa kondisi PKL sesudah pelaksanaan sentralisasi sebesar 24% berada pada interval yang kurang dan sebesar 54% atau mayoritas berada pada interval sedang. Sebesar 22% berada pada interval nyaman.

Sedangkan pada tabel 4.3.1 yang mendiskripsikan bahwa kondisi ekonomi PKL sebelum sentralisasi sebesar 32% berada pada interval yang kurang dan sebesar 62% atau mayoritas berada pada interval cukup. Sebesar 22% berada pada interval lebih dari cukup. Kemudian melihat pada tabel 4.4.1 yang mendeskripsikan bahwa kondisi ekonomi PKL sesudah sentralisasi sebesar 48% berada pada interval yang kurang dan sebesar 50% atau mayoritas berada pada interval cukup. Sebesar 2% berada pada interval lebih dari cukup.

Menurut pandangan Blau dalam menyikapi stimulus yang berbentuk sentralisasi dimana itu adalah program buatan pemerintah yang seharusnya program itu dapat membuat perubahan yang lebih baik dari segi ketertiban kota Surabaya. Oleh sebab itu PKL dalam menyikapi stimulus tersebut dengan menggunakan respon yang ditunjukkan pada tabel 4.5.1 tentang hubungan sosial yang mendeskripsikan bahwa hubungan sosial pedagang dengan pedagang lain, konsumen, serta pengurus pasar sebesar 38% berada pada interval yang sangat membutuhkan dan sebesar 54% atau mayoritas berada pada interval membutuhkan. Sebesar 8% berada pada interval tidak saling membutuhkan.

Kemudian respon yang ditunjukkan PKL yang sudah menjadi pedagang di Pasar DTC Wonokromo dalam bertahan hidup ditunjukkan dengan strategi adaptasi yang dapat dilihat pada tabel 4.6.1 yang mendeskripsikan tentang strategi adaptasi pedagang menghadapi lingkungan baru, pengurus baru beserta peraturan baru dengan sebesar 24% berada pada interval yang sangat adaptif dan sebesar 44% atau mayoritas berada pada interval adaptif. Sebesar 32% berada pada interval tidak adaptif.

E. Kesimpulan

Permasalahan tentang keberadaan sektor informal merupakan masalah yang sangat kompleks, dapat dilihat dari bagaimana munculnya istilah sektor informal yang sebenarnya dampak dari urbanisasi. Perpindahan masyarakat pedesaan ke perkotaan mempunyai banyak pengaruh terhadap sektor informal perkotaan, dari mulai lapangan kerja yang mulai menyempit, dan upah yang rendah, yang berpengaruh pada kaum urban untuk bertaruh demi kebutuhan hidupnya di perkotaan. Namun terbentur pula dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Dari Perda Tersebut lahirlah sentralisasi, yaitu program buatan pemerintah untuk memusatkan PKL menjadi satu tempat dan berdagang di bawah aturan dan payung hukum pemerintah.

Namun ternyata program tersebut tidak serta – merta berjalan mulus karena PKL harus memulai lagi membangun jaringan perdagangan dengan pelanggan, distributor, dan dengan lingkungan baru yaitu pihak pasar.

Praktek sentralisasi juga menimbulkan persaingan dagang di luar dan di dalam terlihat kental dengan penempatan yang sama pada setiap jenis dagangan yang sama. Penjelasan mengenai kondisi tersebut dilihat dari kondisi PKL sebelum – sesudah program sentralisasi, kondisi ekonomi sebelum – sesudah program sentralisasi, mengetahui hubungan sosial PKL dengan lingkungan baru yaitu konsumen , pedagang lain, distributor dan pengurus pasar, serta strategi adaptasi PKL dalam lingkungan barunya dilihat dari adanya aturan, dan jika ada pergantian kepengurusan pasar.

Pustaka

- Hakim, Abdul. 25 Agst 2013. Mencari "Gula" di Surabaya.
<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/116446/mencari-gula-di-surabaya>). Diakses pada tanggal 8 September 2014 pukul 17.00
- Jayadinata, J.T. 1999. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*, Bandung: ITB.
- Firdausy, Carunia Mulya. (1995). "Model dan Kebijakan Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima." Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Perkotaan. Jakarta: Dewan Riset Nasional dan Bappenas bekerjasama dengan Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI
- Martinus Legowo, FX Sri Sadewo & M. Jacky, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Surabaya. Pedagang dan Revitalisasi Pasar Tradisional di Surabaya: Studi Kasus pada Pasar Wonokromo dan Pasar Tambah Rejo Surabaya.
- Keith Hart, "Informal income Opportunities and Urban Employment in Ghana" , dalam *Journal of Modern African Studies*, 11. (1) 1973, hal 61 – 89
- *Teori Sosiologi Modern, Jakarta : Prestasi Pustakaraya, 2007, Ritzer, George and Goodman Douglas J, Teori Sosiologi Modern, Edisi Terbaru, Jakarta: Prenada Media, 2004*
- Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, hlm., 79
- Alisyahbana (2005) *Sisi Gelap Perkembangan Kota*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*,
- http://beasiswa.unair.ac.id/sites/default/files/perpanjangan/2013/ki_M%20Khusna%20Amal_5064.pdf. State of The Art Teori Pertukaran Sosial,